

PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI
JALAN UMUM DI KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI



Oleh :
PUPUT CAHYA NINGRUM
NPM. 0941010062

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA
2014

PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN GRESIK

Disusun Oleh:

PUPUT CAHYA NINGRUM
NPM. 0941010062

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING UTAMA



Dra. Susi Hardjati, M.AP
196902101993032001

**Mengetahui
DEKAN**



Dra. Ec. Hj. Saparwati, Msi
NIP. 195507181983022001

PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN GRESIK

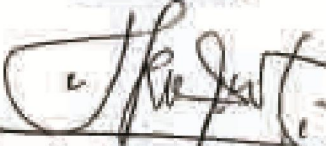
Disusun Oleh:

PUPUT CAHYA NINGRUM
NPM. 0941010062

**Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal :**

Menyetujui

Pembimbing


Dra. Susi Hardjati, M.AP
NIP. 196902101993032001

Tim Penguji :

1.


Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

2.


Dra. Susi Hardjati, M.AP
NIP. 196902101993032001

3.


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001

Mengetahui


Dra. Ec. H. Suparwati, Msi
NIP. 195507181983022001

PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN GRESIK

Nama Mahasiswa : **Puput Cahya Ningrum**
NPM : **0941010062**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Fakultas : **Ilmu Sosial Ilmu Politik**

**Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Telah Direvisi Dan Disahkan
Pada Tanggal**

Penguji I



Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

Penguji II



Dra. Sasi Hardjati, M.AP
NIP. 196902101993032001

Penguji III



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN GRESIK”.

Dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Selesainya kegiatan hingga penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya arahan dan bimbingan dari Ibu, Dra. Susi Hardjati, M.AP yang dengan segala perhatian, bimbingan, arahan yang bermanfaat, dan rela meluangkan waktunya untuk penulis. Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. DR. Ir. Teguh Sudarto MP, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “veteran “ JawaTimur.
2. Ibu Dra. Hj. Suparwati M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “veteran” JawaTimur.
3. Bapak DR. Lukman Arif M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “veteran” JawaTimur
4. Ibu Dra. Susi Hardjati. MAP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN Jatim yang sudah memberikan Ilmu yang sungguh bermanfaat.
6. Ayah & Ibunda tercinta dan terkasih, terima kasih atas semuanya. Yang telah memberikan segalanya sehingga terselesaikan skripsi yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.
7. Saudaraku yang telah meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan Skripsi ini

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih serta besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Teori	14
2.2.1 Pengertian Pengawasan.....	14
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pengawasan	16
2.2.3 Prinsip – Prinsip Pengawasan	18
2.2.4 Sifat – Sifat Pengawasan.....	19

2.2.5	Macam Pengawasan	21
2.2.6	Proses Pengawasan	23
2.2.7	Syarat-syarat Pengawasan	26
2.2.8	Teknik-teknik Pengawasan	27
2.2.9	Sasaran Pengawasan	29
2.2.10	Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik	30
2.3	Parkir	32
2.3.1	Pengertian dan Dasar Hukum	32
2.3.2	Penyelenggaraan Parkir	34
2.3.3	Dasar Kebijakan Parkir	38
2.4	Kerangka Berfikir	45
BAB III	METODE PENELITIAN	45
3.1.	Jenis Penelitian	45
3.2.	Fokus Penelitian	46
3.3.	Lokasi Penelitian	47
3.4.	Sumber dan Jenis Data	48
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	49
3.6.	Metode Analisis Data	51
3.7.	Keabsahan Data	54
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	57
4.1.1	Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	57
4.1.2	Sektor/ Sub Sektor	58

4.1.3	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik..	58
4.1.4	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.....	59
4.1.5	Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	62
4.1.5.1	Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ..	62
4.1.5.2	Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik .	62
4.1.6	TugasSeksiPengendalian dan Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.....	63
4.1.7	Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Gresik	65
4.1.8	Dasar Hukum	65
4.1.9	Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.....	65
4.1.10	Gambaran umum parkir di Kabupaten Gresik	68
4.2.	Hasil Penelitian.....	72
4.2.1.	Pelaku pengawasan.....	73
4.2.2.	Standar Prosedur Operasi Pengawasan.....	77
4.2.3.	Jadwal pelaksanaan pengawasan.....	79
4.3	Pembahasan	82
4.3.1	Pelaku Pengawasan	83
4.3.2	Standar Prosedur Operasi Pengawasan.....	86
4.3.3	Jadwal pelaksanaan pengawasan.....	87
BAB V	PENUTUP	90
5.1	Kesimpulan.....	90

5.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....		93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nama Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum Se Kabupaten Gresik Tahun 2013	5
Tabel 2.1	Instrumen Kebijakan Parkir	40
Tabel 4.1	Komposisi Pegawai Negri Sipil Dinas Perhubungan kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.2	Komposisi Pegawai Negri Sipil Dinas Perhubungan kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Pendidikan	66
Tabel 4.3	Komposisi Pegawai Negri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Berdasarkan Pangkat atau Golongan	67
Tabel 4.4	Daftar Nama Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum Se Kabupaten Gresik Tahun 2013.....	69
Tabel 4.5	Daftar Nama Pengelola Tempat Khusus Parkir Se Kabupaten Gresik Tahun 2013.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses pengawas	23
Gambar 2.2	Kerangka berfikir	44
Gambar 3.1	Komponen dalam analisis data interaktif	53
Gambar 4.1	Bagan struktur organisasi dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	61
Gambar 4.2	Lokasi tepi jalan umum di Jl. Samanhudi	78
Gambar 4.3	Jadwal penertiban parker & PKL.....	80

ABSTRAK

Puput cahya ningrum, 0941010062, Pengawasan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Gresik

Penelitian ini di dasarkan oleh pada masalah terhadap pengawasan pengelolaan parkir di tepi jalan umum yakni adanya pengelola parkir yang menggunakan lahan parkir melebihi batas yang ditentukan dan masih adanya karcis yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini seperti pengamatan, wawancara mendalam, serta dokumen. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif ini dapat memperoleh keteraturan dan sistematis yang ketiganya saling berkaitan yaitu meliputi : Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa (1) pelaku pengawasan dilakukan secara internal oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tepatnya oleh bagian lalu lintas dikatakan belum optimal karena pelaku pengawasan melakukan pengawasan hanya dilakukan secara umum, dalam melaksanakan kegiatan hanya cenderung melihat dari cara ketertiban lalu lintas bukan kepada parkir secara khusus, dan terbatasnya jumlah petugas dalam melaksanakan pengawasan. (2) Standar Prosedur Operasi Pengawasan, Pengawasan perparkiran belum ada Standar Operasi Prosedur yang dibuat oleh Dinas Perhubungan tersebut belum optimal karena kurangnya petugas Dishub dalam menjalankan tugas dan kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap jukir yang melanggar. (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan dapat diketahui bahwa tidak adanya jadwal pelaksanaan pengawasan parkir yang secara khusus yang dibuat oleh dinas perhubungan untuk melakukan pengawasan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan penertiban parkir berjalan tidak efektif dikarenakan petugas yang terbatas dan petugas Dinas Perhubungan yang tidak hanya menangani masalah perparkiran saja.

Kata kunci: pengawasan dan pengelolaan parkir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya yang dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya dalam rangka menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan batas – batas peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut undang – undang no. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pemerintahan dan masyarakat di daerah di persilahkan mengurus rumah tangga sendiri secara bertanggung jawab sebagai kosekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan demi tercapainya kemandirian sebuah daerah.

Untuk terwujudnya kemandirian sebuah daerah, diperlukan dukungan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan perintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha menggali serta mengelola sumber – sumber pendapatannya secara maksimal sehingga bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar, sehingga perlu diketahui otonomi daerah bukan hanya strategi bagaimana untuk mencari pendapatan asli daerah tetapi lebih penting bagaimana memperbaiki kinerja pelayanan publik yang ada. Pemberian pelayanan publik daerah yang baik dan profesional hanya didukung sistem akuntabilitas kebijakan yang bisa dikontrol oleh segenap masyarakat daerah yang bersangkutan

Upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka membutuhkan sumber – sumber penerimaan yang cukup memadai. Dalam kaitannya dengan otonom daerah perlu meningkatkan upaya pembangunan

maka diperlukan dana. Sumber pendapatan daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus sebagai pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang – undang nomor 34 tahun 2000 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah
5. Mengendalikan sumber – sumber yang dimiliki dalam proses produktif.

Menurut Prakoso (2003:88), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Prakoso (2003:88) juga menjelaskan pengertian dari retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah. Sedangkan pengertian parkir menurut Pignataro (1973) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu.. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut menyiratkan bahwa peran penting pemerintah lokal dalam rangka merumuskan kebijakan – kebijakan yang mempunyai dampak positif bagi masyarakat, maka diharapkan adanya kondisi yang sehat bagi perkembangan masyarakat baik secara ekonomi yang sehat bagi perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun dimensi lainnya.

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Gresik sendiri. Sejalan dengan upaya meningkatkan serta menggali sumber – sumber penerimaan daerah, maka pemerintah Kabupaten Gresik berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber – sumber pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya salah satu sumber yang cukup signifikan dalam memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus sebagai bentuk cermin pelayanan publik yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat adalah retribusi parkir. Pengelolaan perparkiran yang efektif dan efisien merupakan harapan dari masyarakat. Hal ini pemerintah lokal juga bisa menggali pendanaan secara maksimal dan memenuhi aspirasi masyarakat lokal yang ada.

Pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kabupaten Gresik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

parkir di tepi jalan umum (On street parking) merupakan kegiatan parkir yang dilakukan dengan memanfaatkan tepi jalan umum sebagai media kegiatan. Dan parkir diluar tepi jalan umum (Of street parking) adalah kegiatan parkir khusus dengan memanfaatkan media lahan terbuka ataupun gedung yang khusus dibangun sebagai penunjang atau pokok usaha perparkiran.

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Gresik dikelola oleh pihak kedua. Dikelola oleh 21 pengelola yang berjumlah 27 titik parkir di tepi jalan umum. Di dalam pengelolaan tersebut masih banyak permasalahan parkir yang terjadi seperti kemacetan, masih adanya pengelola parkir yang menggunakan lahan parkir melebihi batas yang ditentukan, masih adanya karcis yang digunakan 2 fungsi. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak ketertibannya pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Dengan permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berkompetensi dalam melaksanakan pengawasan parkir di tepi jalan umum.

Tabel 1.1
Daftar Nama Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum Se Kabupaten Gresik
Tahun 2013

NO	NAMA PENGELOLA	ALAMAT PARKIR
1	2	3
1.	H. HANIM	Jl. Dr. Wahidin Sudiro husodo
2.	KHABIB	Jl. Pahlawan depan warung wader
3.	FAUZI	Jl. Nyi Ageng Pinatih Gresik (depan Nasi Krawu Bu Marjani)
4.	AKI	a. Jl. Jawa GKB sebelah utara (depan Alfamidi s/d Depot Bu Ima)
		b. Jl. Jawa GKB sebelah selatan (Portal s/d Indomaret, Alfamart GKB)
5.	DEDY HASAN FIRMANSYAH	Jl. Noto Prayitno Gresik (depan warung Biru)

NO	NAMA PENGELOLA	ALAMAT PARKIR
1	2	3
6.	SUKARI	Jl. Jawa GKB Gresik (depan Bakso Giman)
7.	MOCH. MUSTARI	Timur pasar kota (kalitutup)
8.	HARIYANTO	Jl. Usman Sadar Gresik (depan toko serba guna)
9.	ZAKARIYAH	Jl. Panglima Sudirman (depan Gredia)
10.	SAWI	c. Jl. Kapt. Dulasim (depan Nirwana Audio Visual / NAV karaoke s/d Hypermart, Matahari d. Jl. Kapt. Dulasim (dalam Pasar Sidomoro)
11.	R. MOH. MUKSIN	Alon-alon dan Jln. Umar Mas'ud (depan pasar sangkapura)
12.	BUDIONO	e. Jl. AR. Hakim (depan toko Sumatra s/d simpang 3 Jl. Proklamasi) f. Jl. Proklamasi gresik (depan kantor ORARI s/d Ruko GGR Regency)
13.	EDI SANTOSO	Jl. Samanhudi (depan pasar kota sebelah barat pk. 14.00 s/d 24.00)
14.	SOHIB	Jl. Sindujoyo (depan Tk. Sari Kelapa)
15.	MARTILAN	g. Jl. Panglima Sudirman (GSM s/d Gang Lebar) h. Jl. Panglima Sudirman (Gang Salak s/d Golden Star)
16.	MUNIB (Ex. SYAFI' I ALM)	Jl. Sumatra bunderan GKB
17.	SUBAIDI	Jl. Ryaa Tebaloan duduk S.
18.	MASNUN	Jl. Kalimantan (dr. Barkah S/d Nanda Swalayan)
19.	AMRANI	Jl. Usman Sadar (depan Tk. Roti s/d Pencucian Mobil)
20.	AHMAD BUHORI	i. Jl. Gub. suryo (depan Indomaret pkl. 21.00 s/d 05.00 WIB) j. Jl. Gub. Suryo (depan Bakso Tlogo Pojok) k. Jl. Gub. Suryo (depan Warung Bebek Selem)
21.	AHMAD BUHORI	l. Jl. KH. Wakhid Hasyim sebelah timur alon-alon/Pujasera / depan FC dan Alfamart m. Jl. KH. Wakhid Hasyim Sebelah Utara Alon-Alon/Depan Kantor Pemda Lama

Sumber : Dinas Perhubungan Gresik 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa parkir tepi jalan umum di Kabupaten Gresik di kelola oleh 21 pengelola yang memiliki 27 titik parkir tepi jalan umum secara keseluruhan. Dengan kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap sistem perhubungan transportasi angkutan darat di kota Gresik, terutama

menyangkut kondisi perparkiran kendaraan. Kegiatan perparkiran merupakan bagian terpenting dalam manajemen Lalu lintas di kawasan perkotaan, di samping itu pula memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sama halnya dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengelolaan parkir harus dikelola dengan baik demi menciptakan kenyamanan berlalu lintas.

Pengelolaan parkir di Kabupaten Gresik menjadi salah satu tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik khususnya bidang lalu lintas yang petugasnya berjumlah 27. Dan kemudian secara spesifik dilaksanakan oleh seksi pengendalian operasional lalu lintas mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir pada tempat – tempat umum yang menjadi kewenangan kabupaten, dan melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik adalah titik titik parkir tepi jalan umum yang harus dilakukan pengawasan yang dapat mengganggu kenyamanan berlalu lintas. Dengan demikian masih adanya ketidak tetiban pengelola parkir dan mengakibatkan kemacetan. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 8 November 2013 menemukan fakta parkir di alun alun Gresik masih adanya petugas dilapangan dalam hal pemberian tanda bukti (karcis) yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, tanda bukti (karcis) seharusnya digunakan sekali parkir sesudah itu harus dirobek dan

kenyataannya tidak dirobek tetap digunakan lagi untuk pengguna jasa parkir lainnya.

Dan berdasarkan hasil observasi pada tanggal 9 November 2013 menemukan fakta parkir di Jalan Samanhudi masih adanya pengelola parkir yang menggunakan lahan parkir melebihi batas yang sampai menggunakan lahan parkir hingga setengah badan jalan. Dengan terjadinya hal tersebut perlu dilakukan pengawasan dari pihak Dinas Perhubungan setempat.

Pengelolaan perparkiran memiliki kemampuan untuk membantu memecahkan masalah – masalah transportasi seperti kemacetan atau kepadatan lalu lintas. Proses pengawasan dalam pelaksanaan parkir merupakan hal yang penting sekali dilakukan hal ini dilakukan untuk penertiban parkir agar petugas dilapangan sehingga mampu mengoptimalkan kenyamanan berlalu lintas. Menurut Mokler (2002 : 194) mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan. Merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang ditetapkan, menentukan apa terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin sumber daya yang sedang digunakan sedapat mungkin lebih efisien dan efektif

Hal ini menjelaskan dalam sebuah proses pemungutan / kegiatan perlu diadakan sebuah pengawasan yang baik. Hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan ataupun pelanggaran yang dapat menghilangkan potensi –

potensi optimalisasi yang berdampak pada tidak tertib dalam parkir. Disamping faktor pendukung tersebut diatas faktor lainnya adalah adanya monitoring serta evaluasi terhadap beberapa titik parkir tepi jalan umum yang dianggap sebagai kendala dalam kenyamanan berlalu lintas.

Melihat fenomena dan pemasukan diatas dalam mengcopyimalkan parkir ditepi jalan umum, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam tentang pelaksanaan parkir ditepi jalan umum yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik dengan judul penelitian PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR DI KABUPATEN GRESIK (studi tentang parkir di tepi jalan umum Kabupaten Gresik)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengangkat permasalahan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah :
 “Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Parkir tepi Jalan umum Di Kabupaten Gresik”.

1.3 Tujuan Penelitian

Didalam melakukan suatu aktivitas tentunya mempunyai tujuan yang hendak di apai, demikian juga penelitian ini dalam rangka penyusunan skripsi mempunyai tujuan untuk mengetahui pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Gresik”.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang konsep pengawasan dan pengelolaan parkir di Kabupaten Gresik.

2. Bagi Instansi

Memberikan gambaran mengenai pengawasan pengelolaan parkir di Kabupaten Gresik serta sebagai masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai pihak yang berkompetensi dalam pelaksanaan parkir ditepi jalan umum.

3. Bagi Universitas

Sebagai tambahan referensi dalam perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur pada umumnya.